

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang (*developing country*), Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan dalam berbagai sektor untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Pembangunan nasional itu sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, setiap warga negara wajib berupaya meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Selama ini, Indonesia lebih banyak menggantungkan diri pada pinjaman luar negeri dan penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi. Hal ini tentunya riskan karena pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh hutang lebih bersifat sementara. Penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi juga tidak dapat diandalkan secara terus menerus karena sumber minyak dan gas bumi merupakan sumber yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable source*). Selain itu harga minyak di pasaran dunia juga tidak menentu. Menghadapi kondisi ini, pemerintah secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap hutang luar negeri dan berupaya melakukan suatu landasan yang lebih dapat menjamin tersedianya dana dari sumber-sumber di dalam negeri terutama yang berasal dari perpajakan. Sebagai suatu piranti

pembiayaan pembangunan, pajak menempati posisi pertama sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar.

Karena pajak merupakan tumpuan dalam pembiayaan pembangunan nasional maka pajak juga merupakan tumpuan pembangunan daerah, di samping itu di daerah juga terdapat pemasukan dari retribusi daerah yang merupakan sumber kekayaan daerah. Pembangunan daerah dirasakan telah mendorong dan meningkatkan stabilitas, pemerataan, pertumbuhan dan pengembangan daerah serta peran serta dan kesejahteraan masyarakat, diharapkan pemerintah daerah dapat menggali sendiri sumber-sumber daya yang tersedia sebagai modal pembiayaan yang akan digunakan untuk pembangunan daerah. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa adanya biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi daerah masing-masing. Sesuai dengan Undang-Undang no.32/2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, membawa dampak yang luas bagi daerah-daerah kabupaten/kota di Indonesia. Undang-undang ini dianggap memiliki kelebihan yaitu telah menciptakan proses demokratisasi bagi daerah untuk mengambil keputusan dan menggali sumber pendapatan sendiri. Undang-undang tersebut juga membawa dampak lain yaitu

agar tiap-tiap daerah mampu melaksanakan otonomi daerah, tiap daerah harus mampu mengelola sumberdaya yang dimiliki dan membiayai pengeluaran daerahnya sendiri.

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat signifikan maka Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang sangat berperan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Akan tetapi juga perlu diperhatikan juga bahwa Efektivitas dan Efisiensi cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Grobogan juga mempengaruhi dalam penggunaan hasil Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan, sehingga sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Grobogan harus dilakukan dengan Efektif dan Efisien agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemungutan, pengendalian dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal ini dilakukan salah satunya dengan menggunakan pengamatan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan, sehingga dapat dihindari jika sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak Efektif dan tidak Efisien, jika Sistem Pengendalian Intern (SPI) memadai dalam hal ini tujuan proses pemungutan tercapai dengan baik maka dapat dikatakan bahwa sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah Efektif dan Efisien.

Pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah, memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Kabupaten Grobogan yang cukup pesat perkembangannya mulai dilirik para investor untuk memulai usahanya beberapa tahun belakangan ini, seperti semakin banyaknya

berdiri pusat swalayan, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), BKK, BPR dan berbagai macam industri lainnya. Dapat dilihat juga dari Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan yang tiap tahunnya semakin membaik terutama pada pos Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari tahun 2003-2005 hal ini tentunya memiliki sumber PAD khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sangat potensial. Dilihat dari pentingnya penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tersebut yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan melakukan berbagai upaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat digunakan dalam pembangunan Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Sistem Pemungutan Retribusi Daerah sehingga mengambil judul skripsi : **“ EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN GROBOGAN “**

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan

1. Apakah sistem pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan PAD sudah baik?
2. Apakah pemungutan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah efektif dan efisien ?

I.3. Batasan Masalah

Sebagai batasan penelitian ini adalah :

1. Evaluasi sistem pemungutan retribusi daerah di kantor DIPENDA menggunakan evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI).
2. Kriteria Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik dalam kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) harus sesuai dengan empat ciri utama Sistem Pengendalian Intern yang baik (Bambang Hartadi, 1990 ; 57) :
 - a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat.
 - b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang cukup memungkinkan guna pengawasan akuntansi.
 - c. Adanya praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap bagian dalam instansi terkait.
 - d. Tingkat kecakapan pegawai sesuai tanggung jawabnya.
3. Efektivitas dan Efisiensi dari proses pemungutan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dalam hal ini adalah, berhasil tidaknya pemerintah daerah merealisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efektivitas diukur dengan membandingkan realisasi targetnya. Semakin tinggi hasil perbandingan tersebut, maka dikatakan semakin efektif. (Halim, 2001 ; 97)

b. Pengertian Efisiensi

Efisiensi dalam hal pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah membandingkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Semakin kecil hasil dari perbandingan tersebut, maka dikatakan efisien. (Halim, 2001 ; 97)

I.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui baik tidaknya sistem pemungutan Retribusi Daerah dengan menggunakan evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat diketahui kinerja sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Mengetahui seberapa besar tingkat Efektivitas dan Efisiensi pada sistem pemungutan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat diketahui seberapa besar kemampuan dan kinerja pemerintah daerah.

I.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Grobogan dalam mengelola keuangan daerah dan mencari upaya-upaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai hasil penerapan teori, khususnya akuntansi perpajakan dan sebagai bekal pengetahuan bagi penulis apabila akan mengembangkan penelitian lebih lanjut.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yaitu : Kantor DIPENDA Kabupaten Grobogan

1.6.2. Data Penelitian

Data penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Gambaran umum Kabupaten Grobogan.
2. Data realisasi penerimaan PAD pada pos Retribusi Daerah periode 2003-2005.
3. Data target PAD pada pos Retribusi Daerah periode 2003-2005.
4. Data biaya pemungutan PAD pada pos Retribusi Daerah periode 2003-2005.
5. Data realisasi penerimaan Kabupaten Grobogan.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan dengan cara :

1. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data yang mendukung berupa laporan pendapatan daerah dari tahun 2003-2005 dan data-data lain yang diperlukan.
2. Wawancara, yaitu dengan melakukan dialog maupun tanya jawab dengan karyawan-karyawan DIPENDA Kabupaten Grobogan. Ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang belum didapat dari informasi tertulis.

I.6.4. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian :

1. Evaluasi SPI terhadap sistem pemungutan Retribusi Daerah pada kantor DIPENDA. Evaluasi dilakukan dengan cara :

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat.

Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan

Pemisahan tanggung jawab fungsional dilakukan agar semua tahap transaksi tidak diselesaikan oleh satu unit organisasi saja, sehingga dalam pelaksanaan suatu transaksi terdapat internal check diantara unit organisasi pelaksanaan

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang cukup memungkinkan guna pengawasan akuntansi.

Sistem wewenang dan prosedur pencatatan merupakan alat bagi manajemen untuk mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan akuntansinya. Sistem wewenang adalah sistem yang mengarah dapat dan tidaknya suatu kegiatan dilaksanakan.

Sedangkan prosedur dapat diartikan sebagai urutan kegiatan yang biasanya menyangkut beberapaorang dalam satu departemen atau lebih, guna menjamin adanya penanganan yang seragam transaksi yang sering berulang.

- c. Adanya praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap bagian dalam instansi terkait.

Praktek sehat sering diartikan sebagai pelaksanaan aturan-aturan yang sering ditentukan dalam lingkungan perusahaan. Tetapi praktek sehat dapat berarti sebagai alat taktis untuk kerja lainnya suatu rencana hal yang harus dilaksanakan agar rencana yang telah dibuat dapat tercapai.

- d. Tingkat kecakapan pegawai sesuai tanggung jawabnya.

Diantara 4 unsur pokok pengendalian intern diatas unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien, meskipun hanya sedikit unsur SPI yang mendukungnya

2. Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi sistem pemungutan Retribusi Daerah

- a. Evaluasi Efektivitas dengan menggunakan rumus :

Rumus efektivitas PAD pada pos Retribusi Daerah, sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 %, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2001 ; 263)

b. Evaluasi Efisiensi dengan menggunakan rumus :

Rumus efisiensi PAD pada pos Retribusi Daerah, sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan PAD dikategorikan efisien, apabila rasio yang dicapai kurang dari 1(satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. (Halim, 2001; 264)

Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Pasal 3 ayat 1 bahwa biaya pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah

I.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang intinya mengacu pada rumusan masalah yang dikemukakan di atas.

BAB II SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Bab II berisi penjelasan tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI), pengertian, fungsi dan syarat pemungutan Retribusi Daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Bab III berisi tentang letak geografis, keadaan alam, kependudukan, pendidikan di Kabupaten Grobogan serta sistem pemungutan Retribusi Daerah.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab IV berisi mengenai evaluasi proses pemungutan Retribusi Daerah serta analisis Efektivitas dan Efisiensi dari pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan PAD.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V berisi kesimpulan seluruh langkah proses pembahasan dan keterbatasan penelitian serta saran setelah melakukan penelitian.